

Pejabat Publik & Afiliasi Bisnis Energi

#BersihkanIndonesia
2022



**#BERSIHKAN
INDONESIA**

Pejabat Publik & Afiliasi Bisnis Energi

#BersihkanIndonesia
2022

Daftar Isi

Glossary	1
Ringkasan	5
Metode dan Waktu Pemantauan	9
Oligarki	10
Konflik Kepentingan	11
Temuan	15
Simpulan dan Penutup	43

Glossarium

Afiliasi

Afiliasi digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, atau terhubung secara tidak langsung melalui hubungan keluarga, rekanan, dan kelompok dengan industri batubara.

Oligark

Oligark adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar (wealth concentration) atas sumber daya material. Sumber daya material itu lantas dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya yang eksklusif (wealth defense) (Jeffrey A. Winters).

Oligarki

Oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh aktor yang memiliki kekayaan material. (Jeffrey A. Winters)

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan praktik eksploitasi kapasitas profesional (berlaku untuk swasta dan pemerintahan) demi kepentingan pribadi dan korporasi. Beberapa bentuk konflik kepentingan antara lain keterlibatan dalam proses bisnis, afiliasi keluarga atau kerabat dengan pemilik bisnis. (OECD)

Politically Exposed Person (PEP)

Politically Exposed Person (PEP) didefinisikan oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai politik). Karena posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEP berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyusutan, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Dalam rekomendasi FATF, PEP juga mencakup anggota keluarga dan close associates. Close associates dapat meliputi pasangan di luar pernikahan, anggota dari parpol, organisasi sipil, rekan bisnis terutama yang berbagi kepemilikan manfaat atau terhubung melalui cara lain (contoh: keanggotaan bersama dewan perusahaan).



Ringkasan

Aksi demonstrasi massa pro-demokrasi terbesar pasca 21 tahun reformasi terjadi pada tahun 2019. Ketika itu ratusan ribu massa meluapkan kekecewaannya atas kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar sekolah menengah, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan elemen lainnya tumpah ruah di jalanan berbagai kota.

Protes utamanya dipicu oleh ketidaksetujuan terhadap revisi UU no 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Revisi UU dianggap akan melemahkan KPK karena melucuti independensi dan kewenangan lembaga tersebut. Di samping revisi UU KPK, massa juga menuntut hal-hal lain yang kemudian tergabung dalam 7+1 tuntutan. Tuntutan tersebut diantaranya mencakup isu korupsi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokrasi. Termasuk dalam tuntutan tersebut adalah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah, seperti RUU Mineral dan Batubara (Minerba).

Kendati mendapat penolakan besar-besaran serta menelan korban jiwa saat aksi demonstrasi, revisi UU KPK terus berjalan. Tuntutan lainnya pun setali tiga uang, revisi UU no 4/2009 tentang Minerba bahkan disahkan beberapa bulan pasca revisi UU KPK. Pengesahan revisi bahkan dilakukan ketika pandemi Covid-19 tengah melanda, sehingga protes besar-besaran seperti tahun 2019 tidak lagi terjadi. Pengesahan juga mengecoh publik karena perhatian tengah mengarah pada paket Omnibus Law. Muatan pasal dalam UU Cipta Kerja sebagai bagian dari Omnibus Law menguntungkan pebisnis sumber daya alam, terutama batubara. Selang beberapa waktu kemudian, produk hukum bermasalah lainnya turut disahkan. Perppu Penanganan Covid-19 yang kemudian menjadi UU no 2 tahun 2020, revisi UU no 4/2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Disahkannya produk hukum kontroversial yang dilakukan dengan pola serupa, yakni tertutup dan terburu-buru pantas untuk membuat publik bertanya motif serta kepentingan di baliknya. Dugaan kuat mengarah pada adanya kepentingan bisnis di balik pengesahan. Kepentingan itu terakomodir lewat pejabat publik yang memiliki hubungan dengan sektor bisnis. Baik sebagai pemilik maupun pengurus perusahaan, atau terafiliasi secara tidak langsung.

Dalam produk hukum kontroversial, kepentingan pebisnis dapat dilihat secara terang. Melalui revisi UU KPK, pebisnis secara mudah akan membajak proyek-proyek negara tanpa dapat disentuh secara hukum. UU No 2/2020 menguntungkan pebisnis karena memuat pasal penurunan pajak korporasi dari 25% ke 22%.

Melalui UU Minerba, pebisnis mendapat jaminan untuk terus mengeruk sumberdaya mineral dan batubara. Mereka tak perlu lagi bersaing dengan BUMN untuk mendapatkan izin. Revisi UU MK sarat nuansa konflik kepentingan musabab saat disahkan, MK sedang menyidangkan dua UU kontroversial yakni uji formil UU KPK dan uji materi Perppu No 1/2020. Sementara ketentuan dalam UU Cipta Kerja secara terang sangat menguntungkan pengusaha. Singkatnya produk hukum tersebut diduga kuat berpihak pada kepentingan bisnis, bukan kepentingan publik.

Laporan ini mengungkap keterkaitan pejabat publik dengan industri energi, terutama energi batubara. Keterkaitan tersebut menjadi penting dikarenakan industri batubara akan diuntungkan dengan revisi UU Minerba dan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Dalam UU Minerba sebelum revisi (UU nomor 4/2009), pebisnis mesti mengikuti persyaratan yang ketat untuk mendapat perpanjangan izin. Apabila hendak memperpanjang izin dengan beralih dari konsesi batubara jenis PKP2B, perusahaan batubara diharuskan mengikuti lelang terlebih dahulu. Proses lelang juga memberi prioritas kepada BUMN untuk mendapatkan izin pertambangan batubara. Melalui revisi UU Minerba, ketentuan tersebut dihapus. Pebisnis batubara pemegang PKP2B kini mendapatkan jaminan perpanjangan tanpa melalui lelang terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut mulanya diakomodir melalui RUU Cipta Kerja. Namun dengan disahkannya revisi UU Minerba ketentuan tersebut tidak lagi diakomodir. Kendati demikian UU Cipta Kerja yang telah disahkan tetap memiliki ketentuan yang berpotensi menguntungkan pebisnis batubara. Ketentuan tersebut yaitu penghapusan pembayaran royalti 0% kepada pebisnis batubara yang memberikan nilai tambah pada batubara. Pebisnis yang melakukan gasifikasi batubara misalnya, tidak diharuskan membayar royalti kepada negara. Dalam hal ini, pebisnis akan mendapat keuntungan sementara negara berpotensi dirugikan.

Pejabat publik yang ditelusuri ialah anggota DPR dan pejabat eksekutif seperti Menteri ataupun Wakil Menteri. Laporan ini bermaksud menunjukkan, ketika pejabat publik diharuskan berpihak pada kepentingan publik, namun dalam kenyataannya masih terdapat pejabat yang diduga terafiliasi dengan aktor bisnis. Penelusuran menemukan sedikitnya terdapat 25 pejabat publik yang diduga terafiliasi dengan rantai industri batubara. 20 diantaranya merupakan anggota legislatif dan 5 lainnya pejabat eksekutif.



Metode dan Waktu Pemantauan

Penelusuran dilakukan selama Februari 2021 – Desember 2021. Sumber-sumber informasi didapat melalui dokumen resmi akta perusahaan, pemberitaan cetak dan elektronik, laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, dan buku serta jurnal ilmiah. Informasi dihimpun dan disimpulkan melalui metode Social Network Analysis (SNA) atau Analisis Jejaring Sosial. Pola hubungan satu sama lain dianalisis dan disimpulkan melalui metode tersebut.

Oligarki

Menurut ilmuwan politik Jeffrey A. Winters, Oligark adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar (wealth concentration) atas sumber daya material. Sumber daya material itu lantas dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya yang eksklusif (wealth defense). Oligark selalu individu, bukan perusahaan atau kelompok lainnya. Sementara Oligarki diartikan Winters sebagai politik pertahanan kekayaan oleh aktor yang memiliki kekayaan material tersebut.¹ Menurut Winters, untuk melanggengkan agendanya Oligark dapat menempatkan “pion-pion” pada posisi yang strategis. Selain itu oligark dapat mengendalikan partai politik, penegakan hukum, media, dan pemerintahan.

¹ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (New York: Cambridge University Press, 2011), 6



Konflik Kepentingan

Conflict of interests atau konflik kepentingan merupakan istilah yang patut diperhatikan dalam melihat isu pejabat publik. Konflik kepentingan didefinisikan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai praktik eksploitasi kapasitas profesional (berlaku untuk swasta dan pemerintahan) demi kepentingan pribadi dan korporasi. Beberapa bentuk konflik kepentingan antara lain keterlibatan dalam proses bisnis, afiliasi keluarga atau kerabat dengan pemilik bisnis.² Selain itu konflik kepentingan dapat muncul ketika terdapat afiliasi individu, dapat berupa keluarga, pertemanan, finansial, atau relasi sosialnya, yang dapat mengkompromikan keputusan atau tindakan di situs kerja terkait.³

² Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures* (Paris: Secretary-General of the OECD, 2007), diakses dari <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/44956834.pdf>, 33

³ Integrity Star, "UCF Compliance & Ethics Newsletter," diakses dari <https://compliance.ucf.edu/understanding-conflict-of-interest/>.

Konflik kepentingan telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Regulasi yang telah mengatur antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Konflik kepentingan juga diatur dalam Kode Etik DPR RI (Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015). Bagian kelima Kode Etik DPR RI mengatur secara khusus mengenai Keterbukaan dan Konflik Kepentingan.



Politically Exposed Persons (PEP)⁴

Politically Exposed Person (PEP) didefinisikan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai politik).

Karena posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEP berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

⁴ Lihat Financial Action Task Force, "Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)", 2013, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf>.

Dalam rekomendasi FATF, PEP juga mencakup anggota keluarga dan *close associates*. *Close associates* dapat meliputi pasangan di luar pernikahan, anggota dari parpol, organisasi sipil, rekan bisnis terutama yang berbagi kepemilikan manfaat atau terhubung melalui cara lain (contoh: keanggotaan bersama dewan perusahaan). FATF mengharuskan anggota keluarga dan rekan dekat dari PEP ditetapkan dan diperlakukan layaknya PEP pula. Ini dikarenakan potensi penyalahgunaan hubungan untuk tujuan memindahkan hasil tindak pidana atau mempermudah penempatan dan penyamarannya. Serta pula potensi untuk tujuan pendanaan terorisme.



Temuan

Penelusuran terhadap konflik kepentingan pejabat publik menemukan sebanyak 25 pejabat publik terafiliasi dengan industri batubara. 20 diantaranya merupakan anggota legislatif dan 5 lainnya pejabat eksekutif.

Partai Golkar

Terdapat sedikitnya 7 politisi partai Golkar yang menduduki jabatan publik terafiliasi dengan bisnis batubara. Mereka diantaranya merupakan anggota legislatif yaitu Lodewijk F Paulus, Bambang Heri Purnama, Hasnuryadi Sulaiman, Arsyadjuliandi Rachman, Kahar Muzakir, Doni Akbar, dan Azis Syamsuddin.

Lodewijk F. Paulus

Lodewijk F. Paulus, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, diketahui menjabat sebagai komisaris di PT Panca Amara Utama (PAU), perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari batubara.⁵ Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), yang bergerak dibidang pengolahan kimia.⁶ Dalam susunan kepengurusan PT PAU dan ESSA, terdapat nama Garibaldi Thohir yang menjabat komisaris. Garibaldi merupakan pemilik Adaro Energy dan saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir.⁷

Pada tahun 2019, PT Panca Amara Utama pernah dilaporkan oleh PT Rekayasa Industri atas dugaan penggelapan.⁸ Laporan tersebut berkaitan dengan pembangunan Banggai Amonia Plant, yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015.⁹ Proyek yang bekerjasama dengan perusahaan Jepang ini mengalami keterlambatan, sehingga

5 Akta Perusahaan PT Panca Amara Utama, Ditjen AHU Kemenekumham, 24 Mei 2021. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

6 PT Surya Eka Prakasa, "Energy", diakses dari <https://essa.id/en/energy/> pada tanggal 28 Desember 2021.

7 Ibid.

8 Diky Setiawan, "Polisi Diminta Menelaah Bukti Kasus Pau Dengan Rekind," [kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-diminta-menelaah-bukti-kasus-pau-dengan-rekind), 2020, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-diminta-menelaah-bukti-kasus-pau-dengan-rekind>.

9 Agustina Melani, "Jokowi Resmikan Pabrik Amonia Senilai Rp 11 Triliun," [liputan6.com](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2284939/jokowi-resmikan-pabrik-amonia-senilai-rp-11-triliun), 2015, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2284939/jokowi-resmikan-pabrik-amonia-senilai-rp-11-triliun>.

pembangunan harus terus dilanjutkan oleh PT Rekayasa Industri. Hal ini membuat negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 2 triliun.¹⁰ Namun, penanganan kasus tersebut tidak diketahui lebih lanjut.

Lodewijk Paulus merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Sebelumnya, Lodewijk pernah berposisi sebagai Danjen Kopassus.

Ia juga pernah ditempatkan di Satgultor 81 Kopassus TNI AD dengan Luhut Pandjaitan sebagai atasannya.¹¹ Terkait dengan karir politik, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Lodewijk sebagai Sekretaris Jenderal Golkar pada tahun 2018.¹² Namanya juga termasuk dalam susunan kepengurusan tim sukses kandidat presiden Jokowi dan Ma'aruf Amin dan menjabat sebagai wakil ketua.¹³ Pada Oktober 2021, Lodewijk ditunjuk Golkar sebagai wakil ketua DPR menggantikan Azis Syamsudin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Bambang Heri Purnama & Hasnuryadi Sulaiman

Anggota Golkar yang menduduki Komisi VII DPR, Bambang Heri Purnama, diketahui pernah menjabat sebagai direktur sekaligus pemegang saham sebesar 40% di perusahaan pertambangan batubara, PT Batu Hitam Mulia.¹⁴ Kendati demikian dalam akta terakhir

10 Chandra Iswinarno, "Panca Amara Utama Diduga Rugikan Keuangan Negara," *suara.com*, 2019, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2019/05/23/230411/panca-amara-utama-diduga-rugikan-keuangan-negara?page=all>.

11 CNN Indonesia, "Lodewijk Paulus Anak Buah Luhut Berpeluang Gantikan Azis," *CNN Indonesia*, 2021, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210927123803-32-699937/lodewijk-paulus-anak-buah-luhut-berpeluang-gantikan-azis>.

12 Rakhmat Nur Hakim, "Pilih Lodewijk Jadi Sekjen Golkar, Airlangga Bantah Ditekan," *KOMPAS.com*, 2018, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16510331/pilih-lodewijk-jadi-sekjen-golkar-airlangga-bantah-ditekan?page=all#page3>.

13 CNN Indonesia, "Daftar Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-Ma'aruf Amin," *CNN Indonesia*, 2018, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180820181854-32-323717/daftar-lengkap-tim-pemenangan-jokowi-maruf-amin>.

14 Akta perusahaan PT Batu Hitam Mulia, Ditjen AHU Kemenkumham, 16 Maret 2004. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

perusahaan tersebut, nama Bambang Heri tidak lagi ditemukan.¹⁵ PT Batu Hitam Mulia Group memiliki anak perusahaan diantaranya PT Duta Coal Energy, PT Gunung Cahaya Bersama, PT Gunung Persada Mulia dan PT Paranusa Mulia.¹⁶ Bambang diketahui memegang 4% saham PT Tapin Coal Terminal (TCT),¹⁷ perusahaan yang melakukan pembangunan terminal batubara berbasis di Kabupaten Tapin.¹⁸ Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh Trans Kalimantan melalui ruas jalan Marabahan-Margasari yang juga dilewati oleh lima perusahaan pertambangan batubara lainnya.¹⁹

Berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 131 tahun 2020, Kementerian Perhubungan memberikan izin penggunaan terminal khusus pertambangan batubara PT TCT di Desa Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar/muat hasil produksi pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Tapin untuk enam perusahaan diantaranya:²⁰

1. KUD Karya Murni
2. KUD Makmur
3. PT Binuang Mitra Bersama
4. KUD Penerus Baru
5. PT Antang Gunung Metrus
6. PT Bhumi Rantau Energi

15 Akta perusahaan PT Batu Hitam Mulia, Ditjen AHU Kemenkumham, 14 September 2015. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

16 Indonetnetwork.co.id, "Profil Perusahaan PT. Duta Coal Energy," Indonetnetwork.co.id, 2019, diakses dari https://www.indonetnetwork.co.id/company/duta_coal_energy.

17 Akta perusahaan PT Tapin Coal Terminal, Ditjen AHU Kemenkumham, 9 Oktober 2019. Diperoleh tanggal 8 September 2021.

18 TEG Group, "PT. TAPIN COAL TERMINAL, PEMBANGUNAN TERMINAL BATU BARA, KALIMANTAN SELATAN," 2020, diakses dari <https://www.teggroup.co.id/en/pembangunan-terminal-batubara-kalimantan/>.

19 Igam, "Sudah Didenda Rp 50 Juta, Masih Melanggar, Terpaksa Diportal," *jejakrekam.com*, 2017, diakses dari <https://jejakrekam.com/2017/02/23/sudah-didenda-rp-50-juta-masih-melanggar-terpaksa-diportal/>.

20 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 131 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Tapin Coal Terminal di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum," diakses dari http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_131_TAHUN_2020.pdf.

PT Binuang Mitra Bersama merupakan perusahaan yang didirikan oleh Haji Muhammad Hatta atau biasa dipanggil Haji Ciut dan kakaknya Zaini Mahdi, biasa dipanggil Haji Ijay, pengusaha batubara di Kalimantan Selatan.²¹ Nama yang identik dengan Haji Ciut dan Haji Ijay tertera dalam susunan kepengurusan PT TCT. Haji Ijay selaku pemilik saham serta komisaris, sementara Haji Ciut sebagai pemilik saham dan direktur.²²

Dua perusahaan yaitu PT Bhumi Rantau Energi dan PT Antang Gunung Metrus merupakan bagian dari Hasnur Group,²³ perusahaan yang didirikan oleh almarhum H. Abdussamad Sulaiman atau biasa dipanggil Haji Leman.²⁴ Anak Haji Leman, Hasnuryadi Sulaiman merupakan anggota DPR Komisi VII dari fraksi Golkar.²⁵ Adapun terdapat 57 anak perusahaan Hasnur Group meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan media.²⁶

Hingga 2018, Hasnur Group memiliki lima konsesi tambang batubara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Anak perusahaan Hasnur Group, PT Energi Batubara Lestari (EBL) memiliki konsesi di Kalimantan Tengah dengan luas wilayah tanah 3000 Ha.²⁷ Pada akhir 2020, anak perusahaan PT ABM Investama Tbk, PT Cipta Kridatama menyepakati kontrak kerjasama dengan PT EBL sebesar Rp 661 miliar.²⁸ PT ABM Investama Tbk merupakan perusahaan yang

21 Gustidha Budiarti *et al.*, "Di Balik Resepsi Mewah Anak Raja Tambang Batu Bara," CNBC Indonesia, 2018, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180216234618-33-4603/di-balik-resepsi-mewah-anak-raja-tambang-batu-bara/4>.

22 Akta perusahaan PT Tapin Coal Terminal, Ditjen AHU Kemenkumham, 9 Oktober 2019. Diperoleh tanggal 8 September 2021.

23 Hasnur Group, "Bisnis Kami: Pertambangan," diakses dari <https://www.hasnurgroup.com/page/our-business/mining>.

24 Tahir Saleh dan Ferry Sandria, "Siap IPO, Ini Bisnis Keluarga Haji Leman Bos Barito Putera," CNBC Indonesia, 2021, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210728215044-17-264465/siap-ipo-ini-bisnis-keluarga-haji-leman-bos-barito-putera>.

25 Wikipedia, "Hasnuryadi Sulaiman," diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hasnuryadi_Sulaiman.

26 Faisal Yuniyanto, "Tujuh Nilai Inti Jayanti Sari, Penerus Komando Hasnur Group," *antaranews.com*, 2021, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2196506/tujuh-nilai-inti-jayanti-sari-penerus-komando-hasnur-group>.

27 Dina Mirayanti Hutauruk, "Hasnur Group Targetkan Pendapatan RP 2,5 Triliun Tahun Ini," *kontan.co.id*, 2018, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/hasnur-group-targetkan-pendapatan-rp-25-triliun-tahun-ini>.

28 Bambang Supriyanto, "Cipta Kridatama Raih Kontrak Baru Dengan Anak Usaha Hasnur Group: Ekonomi," *Bisnis.com*, 2020, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201221/44/1333612/cipta-kridatama-raih-kontrak-baru-dengan-anak-usaha-hasnur-group>.

dimiliki oleh Keluarga Hamami. Anggota Keluarga Hamami tercatat sebagai salah satu orang terkaya RI versi *Forbes* pada tahun 2019.²⁹

PT Bhumi Rantau Energi yang merupakan bagian dari Hasnur Group, berbasis di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan memiliki luas izin usaha pertambangan sebesar 2.095 Ha.³⁰ Hasnur Group juga memiliki anak usaha yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan, PT Hasnur Riung Sinergi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Morishita, Haji Leman termasuk dari konglomerat yang bertumbuh di era Orde Baru seiring dengan kedekatannya dengan mantan Bupati Barito Selatan, Asmawi Agani.³¹ Sumber yang sama juga menyatakan Haji Leman menjabat sebagai DPD Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 1998 dan memberikan sumbangan sebesar USD 12,000 kepada Asmawi untuk menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Kekuatan politik selanjutnya yang ditunjukkan oleh Haji Leman adalah usahanya untuk pemekaran provinsi Barito pada Juni 2015.³² Namun, upayanya dalam membentuk provinsi Barito tidak terealisasi hingga saat ini.

Haji Leman memiliki tujuh orang anak yaitu Rahcmadi, Jayanti Sari, Nila Susanti, Hasnuryadi, Yuni Abdi Nur, dan Zainal Hadi. Zainal Hadi dan Jayanti Sari adalah dua sosok yang meneruskan Haji Leman di Hasnur Group dan masing-masing menjabat sebagai komisaris dan presiden direktur. Sementara itu, Yuni Abdi Nur saat ini tengah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan.³³

29 Tempo.co, "Ada Lima Wajah Baru dalam Daftar Orang Terkaya RI, Siapa Mereka?", *Tempo.co*, 2019, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1280313/ada-lima-wajah-baru-dalam-daftar-orang-terkaya-ri-siapa-mereka>.

30 Hasnur Group, Loc.Cit.

31 Akiko Morishita, "Prosperous in the Provinces," *Inside Indonesia*, 2011, diakses dari <https://www.insideindonesia.org/prosperous-in-the-provinces>.

32 Didi G Sanusi, "Apa Kabar Wacana Provinsi Barito Raya?", *jejakrekam.com*, 2017, diakses dari <https://jejakrekam.com/2017/06/27/apa-kabar-wacana-provinsi-barito-raya/>.

33 Rilis Kalimantan, "Aklamasi, H Yuni Abdi Nur Sulaiman Nakhodai Golkar Banjarmasin," *RilisKalimantan.com*, 2020, diakses dari <https://riliskalimantan.com/2020/08/16/aklamasi-h-yuni-abdi-nur-sulaiman-nakhodai-golkar-banjarmasin/>.

Dalam PT Ars Gasindo, nama Arsyadjuliandi terakhir tercantum sebagai pengurus dalam akta versi 31 Desember 2010. Ketika itu ia tercatat sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 5%.³⁴ Namun, dalam perubahan terakhir susunan kepengurusan perusahaan tersebut terdapat nama Arsilia Arsyadjuliandi yang berperan sebagai komisaris dan Maihendrasmi Rachman, yang menjabat sebagai pemegang saham sekaligus komisaris utama.³⁵

Riau Muda Group juga memiliki anak usaha lainnya yaitu PT Irsac Power yang merupakan pemegang perjanjian Independent Power Producer (IPP) PLTU 3x7 MW di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara serta PT Indonesia Riau Avantika yang memiliki IUP di Kabupaten Bengkulu Utara.³⁶

Kahar Muzakir & Doni Akbar

Kahar Muzakir merupakan anggota DPR RI dari partai Golkar. Ia berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I dan kini duduk di Komisi III. Kahar Muzakir merupakan salah satu dari 45 anggota DPR yang mengusulkan RUU KPK edisi tahun 2015.³⁷

Kahar memiliki istri bernama Suci Rohani dan lima orang anak bernama Agung Firman Sampurna, Wahyu Sanjaya, Dewi Yustisiana, dan Doni Akbar.³⁸ Agung saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa

34 Akta perusahaan PT Ars Gasindo, Ditjen AHU Kemenkumham, 31 Desember 2010. Diperoleh tanggal 5 September 2021

35 Akta perusahaan PT Ars Gasindo, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 November 2019. Diperoleh tanggal 5 September 2021

36 Riau Muda Group, "Bidang Usaha: Subsidiary," diakses dari <https://www.riaumudagroup.com/bidang-usaha-subsidiary.html>.

37 Ihsanuddin, "Ini 45 Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK," KOMPAS.com, 2016, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/10524641/Ini.45.Anggota.DPR.Pengusul.Revisi.UU.KPK>.

38 Wikipedia, "Kahar Muzakir," diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kahar_Muzakir.

Kuangan (BPK),³⁹ sedangkan Wahyu Sanjaya⁴⁰ merupakan anggota DPR RI dari partai Demokrat.⁴¹ Nama yang identik dengan Dewi Yustisiana diketahui menjabat sebagai Presiden Komisaris Pertamina Lubricants.⁴²

Doni Akbar merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X. Ia menyelesaikan studi sekolah dasar hingga sekolah menengah di Palembang, Sumatera Selatan. Doni terafiliasi dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborongan pertambangan batubara, PT Rire Sanjaya Sakti. Perusahaan ini didirikan di tahun 2012 dan juga bergerak dibidang konstruksi, perdagangan dan perindustrian alat-alat listrik. Dalam susunan kepengurusan dan pemegang saham, terdapat nama Doni Akbar sebagai komisaris.⁴³ Pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut adalah PT Rachmat Kelantan Sakti, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Doni Akbar.⁴⁴

PT Rachmat Kelantan Sakti berdiri sejak tahun 2005. Dalam akta perusahaan sebelum perubahan terakhir tanggal 27 September 2019, nama Kahar Muzakir beserta anak dan istri tercatat sebagai pemegang saham.⁴⁵ Agung Firman diketahui masih menjabat sebagai komisaris sekaligus pemilik saham hingga tahun 2011.

39 Hari Widowati, "Agung Firman Sampurna, Birokrat Tulen Di Kursi Ketua BPK," *Katadata.co.id*, 2019, diakses dari <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a4e5856c47/agung-firman-sampurna-birokrat-tulen-di-kursi-ketua-bpk>.

40 Tirto.id, "Profil Kahar Muzakir," *tirto.id*, diakses dari <https://amp.tirto.id/m/kahar-muzakir-Co>.

41 Yustinus Paat, "Formappi: 48 Anggota DPR Terpilih Potensi Jadi Dinasti Politik", *Beritasatu*, 2019, diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/573519/formappi-48-anggota-dpr-terpilih-potensi-jadi-dinasti-politik>.

42 Pertamina Lubricants, "The Board of Commissioners," diakses dari <https://www.pertaminalubricants.com/aboutus>.
43 Akta perusahaan PT Rire Sanjaya Sakti, Ditjen AHU Kemenkumham, 19 Desember 2017. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

44 Akta perusahaan PT Rachmat Kelantan Sakti, Ditjen AHU Kemenkumham, 27 September 2019. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

45 Akta perusahaan PT Rachmat Kelantan Sakti, Ditjen AHU Kemenkumham, 1 April 2005. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sedikitnya 2 politisi PDIP terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Puan Maharani dan Andi Ridwan Wittiri.

Puan Maharani

Puan Maharani merupakan anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan pada periode 2019 - 2024 menjabat sebagai Ketua DPR RI. Afiliasi Puan Maharani dengan industri batubara dapat ditelusuri melalui suaminya, Hapsoro Sukmonohadi atau biasa disebut Happy Hapsoro. Happy Hapsoro menjabat sebagai pemegang saham di PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik, pertambangan gas bumi dan gas alam, serta konstruksi.⁴⁶ Pada Agustus 2021, Happy memborong 1.862.200 saham RAJA dan menjadi pemegang saham mayoritas.⁴⁷

Dalam susunan kepengurusan RAJA, turut terdapat nama Ketua Kamar Umum Dagang dan Industri (Kadin) dan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid, anggota DPR dari fraksi Nasdem sekaligus pemilik Panasonic Gobel, Rachmat Gobel sebagai komisaris independen,

46 Akta perusahaan PT Rukun Raharja, Ditjen AHU Kemenkumham, 27 April 2021. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

47 Tedy Gumilar, "Happy Hapsoro, Suami Ketua DPR RI Puan Maharani Akumulasi Saham Rukun Raharja (RAJA)," *BusinessInsight*, 2021, diakses dari <https://insight.kontan.co.id/news/happy-hapsoro-suami-ketua-dpr-ri-puan-maharani-akumulasi-saham-rukun-raharja-raja>.

dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai komisaris. Rudiantara sempat ditunjuk menjadi Direktur PT PLN namun batal.⁴⁸

Berdasarkan informasi yang dapat diakses melalui situs perusahaan, RAJA telah berdiri sejak tahun 1993.⁴⁹ Perusahaan ini juga memiliki konsesi pertambangan minyak yang terdapat di Blok Cepu.⁵⁰ Rukun Raharja memiliki delapan anak perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik, perdagangan gas, infrastruktur gas, dan investasi.

Pada tahun 2016, Rukun Raharja membentuk konsorsium dengan Mitsubishi dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk proses tender proyek pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.600 MW.⁵¹ Namun, proyek tersebut dimenangkan oleh konsorium Pertamina. Selepas usaha tender proyek PLTGU Jawa-1, Rukun Raharja melanjutkan proses kualifikasi teknis proyek PLTG Jambi Peaker 100 MW dan

Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Ia mewakili daerah pemilihan Lampung II. Azis terafiliasi dengan industri batubara melalui PT Sinar Kumala Naga, perusahaan pertambangan batubara. Ia tercatat sebagai komisaris perusahaan tersebut hingga kepengurusan

48 Akhdi Martin Pratama, "Alasan Erick Thohir Batal Tunjuk Rudiantara Jadi Dirut PLN," *KOMPAS.com*, 2019, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/23/202420426/alasan-erick-thohir-batal-tunjuk-rudiantara-jadi-dirut-pln?page=all>.

49 Rukun Raharja, "About Us: Company at a Glance," diakses dari <https://www.raja.co.id/company-at-a-glance>.
50 Azis Husaini, "Siap akuisisi blok migas di 2020, ini sejumlah pertimbangan RAJA," *Kontan.co.id*, 2019, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/siap-akuisisi-blok-migas-di-2020-ini-sejumlah-pertimbangan-raja>.

51 Saugy Riyandi, "1 Bulan Lagi, PLN Umumkan Pemenang Tender Pitu Jawa 1 1.600 MW," *merdeka.com*, 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/1-bulan-lagi-pln-umumkan-pemenang-tender-pltu-jawa-1-1600-mw.html>.

berubah pada Februari 2019. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari juga pernah tercatat sebagai pemilik saham sebelum berganti kepengurusan pada Mei 2010.⁵² Nama yang identik dengan Ibu kandung Rita Widyasari, yaitu Dayang Kartini,⁵³ ikut ditemukan dalam akta perusahaan PT Sinar Kumala Naga selaku pemilik saham mayoritas.⁵⁴

Azis telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada mantan penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju. Diduga suap mencapai Rp 3,1 miliar. Dengan penetapan tersebut Azis dinonaktifkan dari Partai Golkar.⁵⁵ Sementara Rita Widyasari telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi perizinan proyek pada sebuah dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵⁶ Dalam kasus yang menjerat Azis, Rita pernah dipanggil untuk memberikan kesaksian.⁵⁷ mengincar tender Jawa-Bali 4 peaker 450 MW dengan total investasi masing-masing mencapai US\$12 – US\$ 136 juta dan US\$500 juta – US\$550 juta.⁵⁸

Saham Rukun Raharja juga dipegang oleh PT Sentosa Mitra Bersama, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, pengangkutan darat, pertanian, perikanan dan jasa pengembangan bisnis. Dalam perusahaan ini, Happy Hapsoro menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham sejak tahun 2011.⁵⁹

52 Akta perusahaan PT Sinar Kumala Naga, Ditjen AHU Kemenkumham, 14 Juli 2020. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

53 Reza Pahlevi, "Hadiri Kampanye Terakhir Prabowo-Sandi, Dayang Kartini Sampaikan Salam dari Rita Widyasari," dari <https://korankaltim.com/berita-terkini/read/22592/hadiri-kampanye-terakhir-prabowo-sandi-dayang-kartini-sampaikan-salam-dari-rita-widyasari>.

54 Akta perusahaan PT Sinar Kumala Naga, Ditjen AHU Kemenkumham, 14 Juli 2020. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

55 Genta Tenri Mawangi, "Azis Syamsuddin nonaktif sebagai kader Partai Golkar," *Antaranews.com*, 2021, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2415853/azis-syamsuddin-nonaktif-sebagai-kader-partai-golkar>.

56 Andi Saputra, "PK Ditolak MA, Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Tetap Dihukum 10 Tahun Bui," *detiknews*, 2021, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5607759/pk-ditolak-ma-eks-bupati-kukar-rita-widyasari-tetap-dihukum-10-tahun-bui>.

57 CNN Indonesia, "KPK Buka Peluang Jerat Azis Syamsuddin Pasal Merintangi Penyidikan," *CNN Indonesia*, 2021, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211225012819-12-738498/kpk-buka-peluang-jerat-azis-syamsuddin-pasal-merintangi-penyidikan>.

58 Sukirno, "Kalah Tender Pltu, Rukun Raharja (Raja) Masih Incar Power Plant RP9,12 Triliun: Market," *Bisnis.com*, 2016, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20161208/192/610200/kalah-tender-pltu-rukun-raharja-raja-masih-incar-power-plant-rp912-triliun>.

59 Akta perusahaan PT Sentosa Bersama Mitra, Ditjen AHU Kemenkumham, 1 April 2021. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

Selama menjabat sebagai Ketua DPR, Puan turut mengesahkan UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Seiring dengan terjadinya protes massa terhadap UU Cipta Kerja, Puan Maharani menghimbau buruh untuk tidak berdemonstrasi dan membuat aktivitas di jalanan.⁶⁰

Andi Ridwan Wittiri

Selain Puan Maharani, afiliasi politisi PDIP dengan industri batubara ditunjukkan melalui Andi Ridwan Wittiri, anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang menduduki Komisi VII. Jelang Pemilu 2014, Ridwan disebut sebagai penyumbang individual terbesar untuk PDIP dengan nilai total 5,2 miliar.⁶¹ Ridwan tercatat sebagai pemegang 4% saham PT Rimau Energy Mining, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara⁶² dan anak perusahaan dari Rimau Group.⁶³ Sebelumnya, Ridwan sempat menjabat sebagai komisaris hingga perubahan akta perusahaan di tahun 2014. Saat ini, Ridwan menjabat sebagai pemilik saham di PT Senamas Energindo Mining, anak perusahaan Rimau Group yang bergerak di bidang pertambangan.⁶⁴

Pada tahun 2010, kelompok Masyarakat Peduli Pembangunan Timur mengeluarkan somasi pada tiga anak perusahaan Rimau Group, diantaranya adalah PT Senamas Energindo Mineral, PT Rimau Electric dan PT Rimau Energy Mining. Somasi tersebut dikeluarkan akibat pembangunan PLTU Dusun Timur yang diluar jadwal dan tidak memerhatikan stok batubara untuk PLTU.⁶⁵

60 Felix Nathaniel, "Jokowi & Puan Maharani: Duet Maut PDIP Dalam Pengesahan Omnibus Law," *tirto.id*, 2020, diakses dari <https://tirto.id/jokowi-puan-maharani-duet-maut-pdip-dalam-pengesahan-omnibus-law-f5P5>.

61 Y Gustaman, "Sumbangan Dana Kampanye Caleg Gerindra Capai RP 6,5 M," *Tribunnews.com*, 2014, diakses dari <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/01/08/sumbangan-dana-kampanye-caleg-gerindra-capai-rp-65-m>.

62 Akta Perusahaan PT Rimau Energy Mining, Ditjen AHU Kemenkumham, 17 Juni 2020, diperoleh tanggal 23 September 2021.

63 MinergyNews.com, "Rimau Group," *MinergyNews.com*, 2015, diakses dari <https://www.minergynews.com/read/2015/11/02/3423/rimau-group.html>.

64 Akta Perusahaan PT Senamas Energindo Mining, Ditjen AHU Kemenkumham, 18 Juli 2014. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

65 ProKalteng, "Masyarakat Sebut PLTU Jaweten Akal-Akalan: Kalteng Pos," *ProKalteng*, 2014, diakses dari <https://kalteng.prokal.co/read/news/12064-masyarakat-sebut-pltu-jaweten-akal-akalan>.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Ada sedikitnya 3 politisi Partai Nasdem yang terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Prananda Surya Paloh, Lestari Moerdijat, dan Rachmat Gobel.

Prananda Surya Paloh & Lestari Moerdijat

Prananda Surya Paloh adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem yang duduk di Komisi I. Ia merupakan wakil dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Prananda merupakan anak dari Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, pendiri dan CEO dari Media Group, perusahaan yang bergerak dalam bisnis media, pertambangan, investasi, dan pertanian.

Lestari Moerdijat adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Lestari merupakan salah satu pendiri Nasdem dan saat ini menjabat sebagai Majelis Tinggi partai. Nama Lestari juga terdaftar dalam tim kampanye Jokowi-Amin sebagai Wakil Bendahara Umum.⁶⁶ Suami Lestari, Wawan Iriawan, menjabat sebagai komisaris BUMN Telkom dan pernah menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Banten.⁶⁷

Prananda dan Lestari terafiliasi dengan industri batubara melalui bisnis pertambangan Media Group. Perusahaan tersebut antara lain PT Media Mining Resources, perusahaan pertambangan batubara, bijih logam,

⁶⁶ CNN Indonesia, "Daftar Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin," Loc.Cit.

⁶⁷ Yadi Jayasantika, "Inilah Susunan Komisaris Telkom, dari Gitaris Abdi Slank hingga Suami Wakil Ketua MPR," *KabarBanten.com*, 2021, diakses dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-591972263/inilah-susunan-komisaris-telkom-dari-gitaris-abdi-slank-hingga-suami-wakil-ketua-mp>.

dan pasir besi. Dalam akta resminya, perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 2008 dan nama Lestari Moerdijat tercatat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham sejak perusahaan ini didirikan hingga tahun 2018.⁶⁸ Pada perubahan terakhirnya yang tercatat pada 31 Mei 2018, terdapat anggota Nasdem, Irsan Sosiawan yang menjabat sebagai Direktur.⁶⁹

Saham PT Media Mining Resources dimiliki oleh PT Multi Asa Prima dan PT Surya Jaya Capital.⁷⁰ PT Multi Asa Prima merupakan perusahaan pertambangan batubara yang juga dimiliki oleh PT Surya Jaya Capital. Lestari Moerdijat diketahui pernah menjabat sebagai Direktur dalam PT Multi Asa Prima.⁷¹ Hasil penelusuran menunjukkan PT Surya Jaya Capital dimiliki oleh Surya Paloh dan Prananda Surya Paloh.⁷² Surya menguasai 51% saham dan Prananda 49% saham perusahaan tersebut. Media Group juga memiliki saham di sebuah perusahaan bernama PT Media Djaya Bersama. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Media group melalui PT Inti Murni Kencana, serta PT ABM Investama melalui PT Reswara Minergi Hartama. PT Media Djaya Bersama memiliki konsesi Izin Usaha Pertambangan di Aceh dan memiliki dua anak perusahaan PT Bara Energi Lestari dan PT Mifa Bersaudara.⁷³ Lestari Moerdijat sempat menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham PT Media Djaya Bersama sejak tahun 2005 hingga 2008.⁷⁴ Hingga tahun 2018, Lestari Moerdijat diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Inti Murni Kencana.⁷⁵

68 Akta perusahaan PT Media Mining Resources, Ditjen AHU Kemenkumham, 29 Desember 2017. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

69 Akta perusahaan PT Media Mining Resources, Ditjen AHU Kemenkumham, 31 Mei 2018. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

70 Akta Perusahaan PT Media Mining Resources, Ditjen AHU Kemenkumham, 16 Oktober 2019. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

71 Akta perusahaan PT Multi Asa Prima, Ditjen AHU Kemenkumham, 7 Desember 2017. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

72 Akta Perusahaan PT Surya Jaya Capital, Ditjen AHU Kemenkumham, 16 Februari 2021, diperoleh tanggal 8 September 2021.

73 Lukmanul Hakim Daulay, "Pertambangan Batu Bara: Media Djaya Bersama Pekerjakan 75% Penduduk Lokal," *Bisnis.com*, 2014, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140314/44/210711/pertambangan-batu-bara-media-djaya-bersama-pekerjakan-75-penduduk-lokal>.

74 Akta perusahaan, PT Media Djaya Bersama, Ditjen AHU Kemenkumham, 6 Mei 2005. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

75 Akta perusahaan PT Inti Murni Kencana, Ditjen AHU Kemenkumham, 11 Desember 2017. Diperoleh 8 September 2021.

Pada Januari 2021, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memanggil direksi PT Mifa Bersaudara atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri pertambangan.⁷⁶ Pada tahun 2018, Gerakan Anti Korupsi Aceh Barat (GeRAK) mempertanyakan PT Mifa Bersaudara yang belum membayarkan royalti sebesar Rp 1,3 miliar ke kas pemerintah daerah setempat.⁷⁷

Dalam upaya revisi UU KPK tahun 2015, Prananda mendukung durasi KPK yang dibatasi selama 12 tahun agar KPK prioritas pada pembersihan besar-besaran di lembaga penegakkan hukum.⁷⁸

Rachmat Gobel

Rachmat Gobel merupakan anggota DPR RI fraksi Nasdem yang duduk di Komisi V. Sebelum menjadi anggota DPR, Gobel sempat menjabat Menteri Perdagangan pada periode pertama Presiden Jokowi sejak 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Thomas Lembong. Gobel merupakan anak dari Thayeb Mohammad Gobel, pendiri Panasonic Gobel, perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan berkembang di era Orde Baru.⁷⁹ Selain Rachmad, Thayeb memiliki enam orang anak antara lain Olga Gobel, Emma Gobel, Clara Gobel, Seminarti Gobel, dan Abdulah Gobel.⁸⁰

76 Rmol Aceh, "Diduga Cemari Lingkungan, Komisi v DPR Aceh Panggil Direksi PLTU Nagan Raya Dan Pt MIFA Bersaudara," RMOLACEH (RMOLACEH, January 22, 2021), <https://www.rmolaceh.id/diduga-cemari-lingkungan-komisi-v-dpr-aceh-panggil-direksi-pltu-nagan-raya-dan-pt-mifa-bersaudara>.

77 Revina Rahayu, "GeRAK Pertanyakan Tunggakan Royalti PT. Mifa Bersaudara," KBA.ONE, 2018, diakses dari <https://www.kba.one/news/gerak-pertanyakan-tunggakan-royalti-pt-mifa-bersaudara/index.html#>.

78 Srihandriatmo Malau, "Prananda Paloh: Pelemahan KPK Tidak Tercantum Dalam Draft RUU," Tribunnews.com, 2015, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/07/prananda-paloh-pelemahan-kpk-tidak-tercantum-dalam-draft-ruu>.

79 Pressrelease.id, "Bermula dari Radio, Thayeb Mohammad Gobel Menjelma Sebagai Pelopor Industri Elektronik di Indonesia," *Pressrelease.id*, 2020, diakses dari <https://pressrelease.kontan.co.id/release/bermula-dari-radio-thayeb-mohammad-gobel-menjelma-sebagai-pelopor-industri-elektronik-di-indonesia?page=all>.

80 Wikipedia, "Thayeb Mohammad Gobel," diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Thayeb_Mohammad_Gobel.

Rachmat Gobel diketahui merupakan CEO Panasonic Gobel Group sejak tahun 2014. Gobel diketahui terafiliasi dengan perusahaan batubara bernama PT Indonesia Coal Development. Saham perusahaan tersebut dimiliki oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.⁸¹ PT Indonesia Coal Development membawahi perusahaan bernama PT Techno Coal Utama Prima.⁸² PT Techno sendiri merupakan pemilik saham mayoritas PT Ridlatama Trade Powerindo.⁸³ Dari seluruh tiga perusahaan yang disebutkan tersebut, Rachmad Gobel menjabat sebagai komisaris.

Gobel Group memiliki bisnis peralatan listrik yang dilaksanakan melalui PT Panasonic Gobel Energy. Dalam susunan kepengurusan perusahaan tersebut, Rachmat Gobel tercatat sebagai presiden direktur mulai tahun 2008 hingga tahun 2014.⁸⁴ Sedangkan, saudaranya Abdullah Gobel saat ini masih aktif menjabat sebagai presiden komisaris sejak tahun 2014. Jelang Pilwalkot Gorontalo 2020, Abdullah Gobel sempat diusulkan akan mencalonkan diri sebagai walikota dan diusung oleh Nasdem.⁸⁵

81 Akta perusahaan PT Indonesia Coal Development, Ditjen AHU Kemenkumham, 5 September 2011. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

82 Akta perusahaan PT Techno Coal Utama Prima, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 April 2012. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

83 Akta perusahaan PT Ridlatama Trade Powerindo, Ditjen AHU Kemenkumham, 28 September 2011. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

84 Akta perusahaan PT Panasonic Gobel Energy, Ditjen AHU Kemenkumham, 15 Juni 2021. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

85 Yudhistira Saleh, "Hamim Pou Dan Abdullah Gobel Didorong Bertarung Di Pilgub," *Dulohupa.id*, 2021, diakses dari <https://dulohupa.id/hamim-pou-dan-abdullah-gobel-didorong-bertarung-di-pilgub/>.

Partai Gerindra

Sedikitnya sejumlah 6 politisi Partai Gerindra terafiliasi dengan industri batubara. Mereka diantaranya Prabowo Subianto, Hendrik Lewerissa, Budi Djiwandono, Sugiono, Bambang Kristiono, dan Mulyadi

Prabowo Subianto, Hendrik Lewerissa, Budi Djiwandono, dan Sugiono

Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan RI yang menjabat sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya ia mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 sebagai Calon Presiden, dan tahun 2009 sebagai Calon Wakil Presiden. Prabowo memiliki saudara kandung bernama Hashim Djojohadikusumo dan Bianti Djiwandono. Anak Bianti, Budi Djiwandono adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang kini duduk di Komisi IV.⁸⁶ Prabowo terafiliasi dengan industri batubara melalui bisnis pertambangan yang dimilikinya yaitu Nusantara Energy Resources.⁸⁷ Selain itu Hashim ditemukan afliasinya dengan Arsari Group.⁸⁸

Nama Prabowo tercatat sebagai pemegang saham sebesar 1% di PT Nusantara Santan Coal.⁸⁹ Sementara itu, PT Nusantara Energindo Coal tercatat sebagai pemegang saham mayoritas

⁸⁶ Wikipedia, Budi Djiwandono, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Djiwandono.

⁸⁷ Rio Apinino, "Mengenal Nusantara Energy & Prabowo yang Termuat di Paradise Papers," [tirto.id](https://tirto.id/mengenal-nusantara-energy-prabowo-yang-termuat-di-paradise-papers-czHS), 2017, diakses dari <https://tirto.id/mengenal-nusantara-energy-prabowo-yang-termuat-di-paradise-papers-czHS>.

⁸⁸ Muhammad Idris, "Mengintip Kekayaan Hashim Djojohadikusumo, Adik Menhan Prabowo," [KOMPAS.com](https://money.kompas.com/read/2020/12/04/160458326/mengintip-kekayaan-hashim-djojohadikusumo-adik-menhan-prabowo?page=all), 2020, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/12/04/160458326/mengintip-kekayaan-hashim-djojohadikusumo-adik-menhan-prabowo?page=all>.

⁸⁹ Akta Perusahaan PT Nusantara Santan Coal, Ditjen AHU Kemenkumham, 6 Maret 2020. Diperoleh tanggal 30 September 2021.

dengan total 99%. Dalam susunan kepengurusan perusahaan, terdapat nama Sugiono, anggota DPR Komisi I dari fraksi Gerindra, yang menjabat sebagai direktur. Selain itu, terdapat juga Widjono Hardjanto, mantan anggota DPR dari fraksi Gerindra.⁹⁰

Prabowo diketahui memiliki 40% saham PT Nusantara Energindo Coal. Dalam perusahaan tersebut, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Hendrik Lewerissa tercatat sebagai Direktur. Sementara 60% saham lainnya dikuasai oleh PT Ithaca Resources.⁹¹

Dalam susunan kepengurusan terdapat juga nama Zafril Ansgar Hamzah yang menjabat sebagai Direktur. Ia diketahui merupakan komisaris PT Artha Tunggal Mandiri.⁹² Selain itu terdapat nama Agoes Projosasmito selaku Komisaris, dan diketahui merupakan Direksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.⁹³

Bambang Kristiono

Politisi Partai Gerindra lainnya yang terafiliasi dengan rantai industri batubara adalah Bambang Kristiono, anggota DPR yang kini duduk di Komisi II. Bambang tercatat menjabat sebagai komisaris utama dan pemegang 99% saham PT Trimahesa Cakrawala, perusahaan pertambangan batubara.⁹⁴ Dalam susunan kepengurusan, terdapat Joko Surono yang menjabat sebagai direktur dan pernah mencalonkan diri

90 Berita Satu, "DPR Berhentikan Ketua Fraksi Gerindra," BeritaSatu, 2012, diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/37910/dpr-berhentikan-ketua-fraksi-gerindra>.

91 Akta Perusahaan PT Nusantara Energindo Coal, Ditjen AHU Kemenkumham, 7 Juni 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

92 Kementerian ESDM, "Profil Perusahaan Artha Tunggal Mandiri," Minerba One Data Indonesia, diakses dari <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/668>.

93 Abdul Susila, "Lingkar Arifin Panigoro dan Agoes Projosasmito Kuasai PSS Sleman," skor, 2020, diakses dari <https://liga1.skor.id/lingkar-arifin-panigoro-dan-agoes-projosasmito-kuasai-pss-sleman-01328381>.

94 Akta perusahaan PT Trimahesa Cakrawala, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 April 2021. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

sebagai calon legislatif dari Gerindra.⁹⁵ Selain PT Trimahesa Cakrawala, Bambang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan pertambangan

mineral PT Tambang Sungai Suir⁹⁶ dan PT Nusantara Swadesi Mining.⁹⁷ Selain Bambang, dalam akta PT Tambang Sungai Suir yang terakhir diperbaharui pada 20 Oktober 2011, juga terdapat nama anggota DPR dari fraksi Gerindra seperti Mohamad Hekal, dan Prabowo Subianto sebagai pemegang saham sebesar 30%.⁹⁸

Mulyadi

Selain itu, terdapat nama Mulyadi, anggota Komisi V fraksi Gerindra, yang menjabat komisaris PT Elyon Coal Perdana, perusahaan yang bergerak dalam bisnis pertambangan batubara.⁹⁹

95 Pemilu.Asia, "Joko Surono," diakses dari <http://pemilu.asia/rzeiwbxrj.html?lang=ind&c=54&opt=20&s=107&y=2014&id=57469>.

96 Akta perusahaan PT Tambang Sungai Suir, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 Oktober 2011. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

97 Akta perusahaan PT Nusantara Swadesi Mining, Ditjen AHU Kemenkumham, 19 April 2021. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

98 Akta perusahaan PT Tambang Sungai Suir, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 Oktober 2011. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

99 Akta perusahaan, PT Elyon Coal, Ditjen AHU Kemenkumham, 4 Oktober 2017. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

Partai Amanat Nasional

Tercatat sedikitnya 1 politisi Partai Amanat Nasional terafiliasi dengan industri batubara. Politisi tersebut ialah Hanna Gayatri.

Hanna Gayatri

Hanna Gayatri merupakan anggota DPR RI dari PAN dan kini duduk di Komisi V. Hanna merupakan kakak kandung dari politisi PAN Hatta Rajasa. Hatta pernah mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto pada tahun 2014. Afiliasi Hanna dengan industri batubara dapat ditemukan melalui bisnis Arthindo Group yang dimiliki oleh keluarga Hatta Rajasa.

Pada tahun 1982, Hatta Rajasa mendirikan PT Arthindo Utama, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, bersama Bambang Sukarsono, Alimin Abdullah, dan Affan Machmud.¹⁰⁰ Hingga saat ini, PT Arthindo Utama setidaknya memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Arthasia Cipta Pratama, perusahaan pertambangan batubara yang melakukan eksplorasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah¹⁰¹ dan PT Artha Daya Coalindo, perusahaan penyediaan batubara. Adapun PT Artha Daya Coalindo dimiliki bersama dengan PT Indonesia Power dan PT Desira Pratama Lines.¹⁰²

100 Arthindo Group, "Company Overview," diakses dari <https://www.arthindo.id/arthindo-utama.html>.

101 Arthindo Group, "Arthasia Cipta Pratama," diakses dari <https://www.arthindo.id/arthasia-cipta-pratama.html>.

102 PT Artha Daya Coalindo, "Sekilas Perusahaan," diakses dari <https://www.arthadayacoalindo.co.id/>.

Dalam struktur kepengurusan PT Arthindo Utama, terdapat Mohamad Reza Ihsan Rajasa dan Audy Satria Wardhana, masing-masing anak¹⁰³

dan menantu¹⁰⁴ dari Hatta Rajasa yang menjabat sebagai direktur di perusahaan ini.¹⁰⁵ Reza Ihsan Rajasa juga tercatat sebagai komisaris di PT Arthasia Cipta Pratama¹⁰⁶ dan pemegang saham sebesar 30% di PT Parakrama Bumindo, perusahaan pertambangan batubara. Anak Hatta Rajasa lainnya, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa juga tercatat sebagai komisaris di PT Parakrama Bumindo sejak tahun 2017.¹⁰⁷

Sementara itu, terdapat tiga politisi PAN yang pernah menjabat di PT Arthindo Utama, antara lain Alimin Abdullah, Jon Erizal, dan Ahmad Hafisz Thohir. Ketiganya merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN. Achmad menjabat sebagai komisaris, Jon sebagai direktur dan Alimin sebagai pemegang saham sebesar 10%.¹⁰⁸ Ketiganya meletakkan jabatan masing-masing menjelang terpilih menjadi anggota DPR di tahun 2014. Achmad Hafisz Thohir merupakan adik dari Hanna Gayatri dan Hatta Rajasa.¹⁰⁹

103 Azis Husaidi, "Reza nahkoda baru bisnis migas Hatta Rajasa," *Kontan.co.id*, 2016, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/reza-nahkoda-baru-bisnis-migas-hatta-rajasa>.

104 detikNews, "Hatta Rajasa Nikahkan Putri Ketiganya, Azimah," *detikNews*, 2013, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2389102/hatta-rajasa-nikahkan-putri-ketiganya-azima>.

105 Akta perusahaan, PT Arthindo Utama, Ditjen AHU Kemenkumham, 21 Agustus 2020. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

106 Akta perusahaan PT Arthasia Cipta Pratama, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 Juli 2018. Diperoleh tanggal 8 September 2021.

107 Akta perusahaan PT Parakrama Bumindo, Ditjen AHU Kemenkumham, 22 Oktober 2018. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

108 Akta perusahaan, PT Arthindo Utama, Ditjen AHU Kemenkumham, 28 Desember 2013. Diperoleh pada 5 September 2021.

109 Achmad Al Fiqri, "Adik Hatta Rajasa diperiksa KPK," *alinea.id*, 2019, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/wakil-ketua-komisi-xi-dpr-adik-hatta-rajasa-diperiksa-kpk-b1Xm69nhh>.

Wahyu Sanjaya

Wahyu Sanjaya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang sekaligus menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Wahyu merupakan anak kandung dari anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dan diduga saudara kandung anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Doni Akbar. Serupa dengan saudara kandungnya, ia terafiliasi dengan industri batubara melalui perusahaan PT Rire Sanjaya Sakti dan PT Rachmat Kelantan Sakti.

Wahyu diketahui pernah menjabat Komisariss sekaligus pemegang saham PT Rire Sanjaya Sakti dan sejak tahun 2015, namanya tidak lagi tercantum sebagai pengurus maupun pemilik saham. Begitu juga dengan PT Rire Sanjaya Sakti. Dalam perusahaan tersebut, Wahyu pernah memiliki 65,08% saham sebelum melepaskannya pada Desember 2014. Dalam akta perusahaan PT Rachmat Kelantan Sakti hingga perubahan terakhir tanggal 27 September 2019, terdapat nama Kahar Muzakir beserta anak dan istrinya sebagai pemegang saham.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki sedikitnya 1 politisi yang terafiliasi dengan industri batubara. Politisi tersebut adalah Daniel Johan.

Daniel Johan

Daniel Johan merupakan anggota DPR Komisi IV dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Daniel merupakan mantan Direktur Utama PT Harsco Nusantara, perusahaan pemborongan pertambangan dan perdagangan batubara, dan saat ini memegang 50% saham perusahaan tersebut.¹¹⁰ Dalam isu UU Minerba, Daniel menyatakan undang-undang tersebut terlalu memanjakan investor dan tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga UU Minerba perlu direvisi.¹¹¹ Pada Pilpres 2014, Daniel terlibat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - JK. Pada Pilpres selanjutnya, Daniel kembali terlibat Wakil Direktur TKN Jokowi - Ma'ruf Amin.¹¹²

110 Akta perusahaan PT Harsco Nusantara, Ditjen AHU Kemenkumham, 19 September 2019. Diperoleh tanggal 23 September 2021.

111 Partai Keadilan Bangsa, "Kata Daniel Johan Terkait UU Yang Makin Liberal," FPKB DPR RI, 2018, diakses dari <https://www.fraksipkb.com/2018/07/23/kata-daniel-johan-terkait-uu-yang-makin-liberal/>.

112 DPR RI, "Daniel Johan, S.E.", diakses dari <https://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/1558>.



Non-Partai

Terdapat sedikitnya 5 pejabat publik yang bukan merupakan kader atau anggota parpol yang terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Moeldoko, Angela Tanoesodibjo, Luhut Binsar Pandjaitan, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Moeldoko

Moeldoko adalah Kepala Staf Kepresidenan RI. Ia terafiliasi dengan industri batubara melalui PT Moelti Artha Cakra Sentosa (MACS), perusahaan yang diantaranya bergerak dalam bidang pertambangan dan pengolahan batubara. Nama Moeldoko tidak tercantum dalam

susunan kepengurusan perusahaan tersebut, akan tetapi istrinya yaitu Koesni Harningsih serta kedua anaknya, Joanina Rachma Novinda dan Randy Bimantoro¹¹³ masing-masing tercatat menjabat sebagai pengurus. Koesni diketahui merupakan pemegang saham, Joanina sebagai Direktur dan pemilik 10% saham, dan Randy sebagai komisaris serta pemilik 90% saham.¹¹⁴

Joanina juga tercatat sebagai Komisaris dan pemilik 75% saham PT Bumi Energi Indonesia (Bumer), perusahaan pengolahan batubara.¹¹⁵ Secara lebih lanjut, PT Moelti Artha Cakra Sentosa dan PT Bumi Energi Indonesia masing-masing memegang saham sebesar 90% dan 10% PT Moelti Pertanian Indonesia, perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dalam perusahaan tersebut, Joanina dan Randy menjabat sebagai direktur dan komisaris.

Selain perusahaan yang telah disebut, Moeldoko juga mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan kendaraan listrik, PT Mobil Anak Bangsa Indonesia.¹¹⁶ Dalam susunan kepengurusan perusahaan tersebut, Joanina menjabat sebagai Direktur.¹¹⁷ Selain itu, nama Joanina tercatat sebagai komisaris di PT Mandiri Jaya Bara hingga awal tahun 2017, perusahaan yang diantaranya menjalankan bisnis pertambangan batubara.¹¹⁸ Dalam susunan kepengurusan, juga terdapat anggota DPR RI Fraksi PDIP, Achmad Basarah yang menjabat sebagai direktur hingga tahun yang sama.

113 Haris Prabowo, "Sirkel Bisnis Mobil Listrik di Jakarta & Tambang Nikel Perusak Alam," [tirto.id](https://tirto.id/gibR), 2021, diakses dari <https://tirto.id/gibR>.

114 Akta perusahaan PT Moelti Artha Cakra Sentosa, Ditjen AHU Kemenkumham, 18 September 2018. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

115 Akta perusahaan PT Bumi Energi Indonesia, Ditjen AHU Kemenkumham, 16 Juni 2018. Diperoleh tanggal 5 September 2021.

116 PT Mobil Anak Bangsa Indonesia, "About Us," diakses dari <https://www.mabindonesia.com/>.

117 Akta perusahaan PT Mobil Anak Bangsa Indonesia, Ditjen AHU Kemenkumham, 6 Februari 2019. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

118 Akta perusahaan PT Mandiri Jaya Bara, Ditjen AHU Kemenkumham, 22 Oktober 2020. Diperoleh 5 September 2021.

Angela Tanoesoedibjo

Angela Tanoesoedibjo merupakan Wakil Menteri Pariwisata RI dan anak dari Hary Tanoesoedibjo, pendiri Partai Perindo dan pemilik MNC Group. Ia terafiliasi dengan industri batubara melalui bisnis Hary Tanoesoedibjo. Anak perusahaan MNC Group yang berkaitan dengan pertambangan batubara adalah PT MNC Energi.¹¹⁹

Dalam susunan kepengurusan perusahaan tersebut, Hary Tanoe menjabat sebagai Direktur Utama.¹²⁰ Perusahaan ini juga menjadi pemegang saham mayoritas di anak perusahaan pertambangan batubara lainnya, PT Nuansacipta Coal Investment.¹²¹ Selain itu, Hary Tanoe juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Coal Resources, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara.¹²²

Luhut Binsar Pandjaitan

Afiliasi pejabat publik dengan industri batubara selanjutnya ditunjukkan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut terafiliasi melalui group PT TBS Energi Utama (TOBA), salah satu grup perusahaan batubara terbesar di Indonesia.

Mayoritas saham TOBA sebelumnya dikuasai oleh Luhut. Namun saat ini mayoritas saham TOBA dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Singapura, Highland Strategic Holdings Pte Ltd dengan penguasaan

119 Ika Fatma Ramadhansari, "Perusahaan Batu Bara MNC Group Bakal Diakuisisi IATA," *Bisnis.com*, 2021, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20211015/192/1454982/perusahaan-batu-bara-mnc-group-bakal-diakuisisi-iata>.

120 Akta Perusahaan, PT MNC Energi, Ditjen AHU Kemenkumham, 22 Juni 2018. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

121 Akta perusahaan PT Nuansacipta Coal Investment, Ditjen AHU Kemenkumham, 24 Agustus 2020. Diperoleh tanggal 19 Agustus 2021.

122 Akta perusahaan PT Bhakti Coal Resources, Ditjen AHU Kemenkumham, 29 April 2020. Diperoleh tanggal 30 September 2021.

saham sebesar 61,91%¹²³. Highland sendiri dikuasai oleh perusahaan Singapura lainnya, Watiga Trust.¹²⁴ Hingga saat ini pemilik akhir dari Watiga Trust belum diketahui.

Selain dimiliki oleh Highland, saham TOBA dimiliki oleh PT Toba Sejahtra sebesar 10%, Bintang Bara B.V sebesar 10%, PT Bara Makmur Abadi sebesar 6,25%, dan PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,10%. Akan tetapi, dalam dokumen akta perusahaan PT TBS Energi Utama, tidak tercantum Highland Strategic Holdings Pte Ltd sebagai pemilik saham mayoritas. Selain nama individu yang tercatat sebagai pemilik saham, perusahaan yang tercatat adalah PT Bara Makmur Abadi dengan saham 6,25%, PT Sinergi Sukses Utama dengan saham sebesar 5,10%, dan PT Toba Sejahtra dengan saham 9,99%. Saham sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 78,67%.¹²⁵ Adapun Luhut masih tercatat sebagai pemilik saham mayoritas PT Toba Sejahtra.¹²⁶ Dalam struktur kepengurusan TOBA, terdapat nama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Independen,¹²⁷ dan keponakan Luhut Pandjaitan, Pandu Patria Sjahrir sebagai Wakil Direktur Utama.¹²⁸

Selain terafiliasi melalui grup TOBA, Luhut juga memiliki afiliasi ke PT Kutai Energi, perusahaan pertambangan batubara.¹²⁹ PT Toba Sejahtra merupakan pemegang saham mayoritas PT Kutai Energi.¹³⁰ Meskipun namanya tidak tercatat dalam susunan kepengurusan, terdapat

123 PT TBS Energi Utama, "About TBS," diakses dari <https://www.tbsenergi.com/company-overview/about-toba-bara/main-shareholder-profile>.

124 Global Witness, "Bagian 2: Luhut Pandjaitan dan para pembeli tersembunyi," global witness, 2019, diakses dari <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/bagian-2-luhut-pandjaitan-dan-para-pembeli-tersembunyi/>.

125 Akta perusahaan PT TBS Energi Utama, Ditjen AHU Kemenkumham, 17 Juni 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

126 Akta perusahaan PT Toba Sejahtra, Ditjen AHU Kemenkumham, 18 November 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

127 PT TBS Energi Utama, "Company Overview," diakses dari <https://www.tbsenergi.com/company-overview/management-profile/board-of-commissioners>.

128 Ibid.

129 Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), "Our Member: PT Kutai Energi," diakses dari <http://www.apbi-icma.org/en/member-detail/433/pt-kutai-energi>.

130 Akta perusahaan PT Kutai Energi, Ditjen AHU Kemenkumham, 24 November 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

nama yang identik dengan anak Luhut Pandjaitan, Kerri Nabassaria Pandjaitan¹³¹ sebagai komisaris utama PT Kutai Energi.

Sandiaga Uno & Erick Thohir

Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata RI sekaligus pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), perusahaan yang ia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.¹³² Ia terafiliasi dengan industri batubara melalui bisnis batubara PT Saratoga. PT Saratoga memiliki saham sebesar 15,18% PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Sandiaga juga pernah menjabat Direktur PT Saratoga¹³³ dan PT Adaro Energy Tbk¹³⁴ sebelum mundur pada tahun 2015. Meskipun Sandiaga Uno telah mengundurkan diri dari jabatannya, ia masih memegang saham ADRO sebesar 2,1%¹³⁵ dan PT Saratoga sebesar 21,5%.¹³⁶

Sandiaga merupakan politisi berlatarbelakang pebisnis. Perjalanan karirnya sebagai pebisnis memiliki kaitan dengan keluarga Erick Thohir, yaitu melalui ayah dan kakak kandung Erick, Mohammad Teddy Thohir dan Garibaldi "Boy" Thohir.¹³⁷ Garibaldi dan Sandiaga kini sama-sama tercatat sebagai pemilik saham PT Adaro Energy.¹³⁸

131 Amal Nur Ngazis dan Isra Berlian, "Nyoblos, Luhut ke Warga: Sudah Tahu Kan Siapa yang Mesti Dipilih," *viva.co.id*, 2019, diakses dari <https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1140432-nyoblos-luhut-ke-warga-sudah-tahu-kan-siapa-yang-mesti-dipilih>.

132 Muhammad Idris, "Gurita Bisnis Saratoga, Perusahaan Milik Menparekraf Sandiaga Uno," *KOMPAS.com*, 2020, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/12/27/111200026/gurita-bisnis-saratoga-perusahaan-milik-menparekraf-sandiaga-uno?page=all>.

133 Antonia Timmerman, "Sandiaga Uno Mundur dari Saratoga," *BeritaSatu*, 2015, diakses dari <https://www.beritasatu.com/archive/281313/sandiaga-uno-mundur-dari-saratoga>.

134 detikFinance, "Sandiaga Uno Mundur dari Direktur Adaro Energy," *detikFinance*, 2015, diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2893333/sandiaga-uno-mundur-dari-direktur-adaro-energy>.

135 Akta perusahaan PT Adaro Energy, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 Mei 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

136 Akta perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya, Ditjen AHU Kemenkumham, 28 April 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

137 Syakur Usman, "Cerita 'Perkariban' Sandiaga Uno dengan Erick dan Thohir Family," *merdeka.com*, 2018, diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/antara-erick-thohir-sandiaga-uno-dan-thohir-family.html>.

138 Akta perusahaan PT Adaro Energy, Ditjen AHU Kemenkumham, 20 Mei 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

Perusahaan pertambangan lain yang disebut-sebut dimiliki oleh Garibaldi dan Sandiaga adalah perusahaan pertambangan bernama PT Merdeka Copper Gold.¹³⁹ Dalam dokumen akta PT Merdeka Copper Gold, Garibaldi tercatat sebagai komisaris dalam perusahaan tersebut.¹⁴⁰ Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, diketahui pernah menjabat sebagai komisaris PT Merdeka Copper Gold hingga kepengurusan berubah pada Januari 2020. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti merupakan Wakil Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mantan Wakil Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar juga diketahui pernah menjabat komisaris perusahaan tersebut hingga kepengurusan berubah pada Juli 2019.¹⁴¹

139 Warta Ekonomi, "Saham Perusahaan Milik Sandiaga-Boy Thohir Amblas Parah Gara-Gara...", 2020, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read304376/saham-perusahaan-milik-sandiaga-boy-thohir-amblas-parah-gara-gara>.

140 Akta perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Ditjen AHU Kemenkumham, 25 Mei 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.

141 Akta perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Ditjen AHU Kemenkumham, 25 Mei 2021. Diperoleh tanggal 27 Desember 2021.



Kesimpulan & Penutup

Laporan ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat publik yang terafiliasi dengan industri bisnis energi, terutama batubara. Hal ini menunjukkan ada potensi konflik kepentingan para pejabat publik dalam menentukan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan industri batubara, keterkaitan pejabat publik dan potensi konflik kepentingan dapat memperburuk dampak dari industri tersebut. Kerusakan lingkungan, terancamnya nyawa ataupun kesehatan warga, dan sebagainya. Jika pejabat publik mendahulukan kepentingan privat, maka permasalahan tersebut dapat diabaikan dan tidak diselesaikan. Terlebih lagi, dampak luas dari krisis iklim tidak akan pernah dapat ditanggulangi.

Temuan di atas turut dapat dijadikan landasan dalam memunculkan diskursus etika publik, pengaturan yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan, serta keharusan pejabat publik untuk menaati regulasi yang berlaku mengenai konflik kepentingan.

**#BERSIHKAN
INDONESIA**

